

**LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH**

**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA BALIKPAPAN**

**TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, serta adanya pergeseran nilai manajemen pemerintahan menjadi manajemen pemerintahan berbasis kinerja, yang berorientasi pada berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan, mendorong instansi pemerintah untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bukan sekedar formalitas tetapi telah menjadi komitmen.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), merupakan suatu sistem akuntabilitas yang memadai yang dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para *stakeholders*, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Salah satu bentuk komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan adalah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2018. Serta merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Berikut akan diuraikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2018, yang menjabarkan rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2018 diperlukan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada waktu yang akan datang.

Balikpapan, Februari 2019

KEPALA BAPPEDA LITBANG KOTA BALIKPAPAN

NINING SURTININGSIH

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Pembentukan Organisasi**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26). Bappeda Litbang merupakan unsur staf dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang bertanggungjawab kepada Wali Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Tugas Pokok Bappeda Litbang Kota Balikpapan adalah membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya.

### **1.2 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan, Bappeda Litbang Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

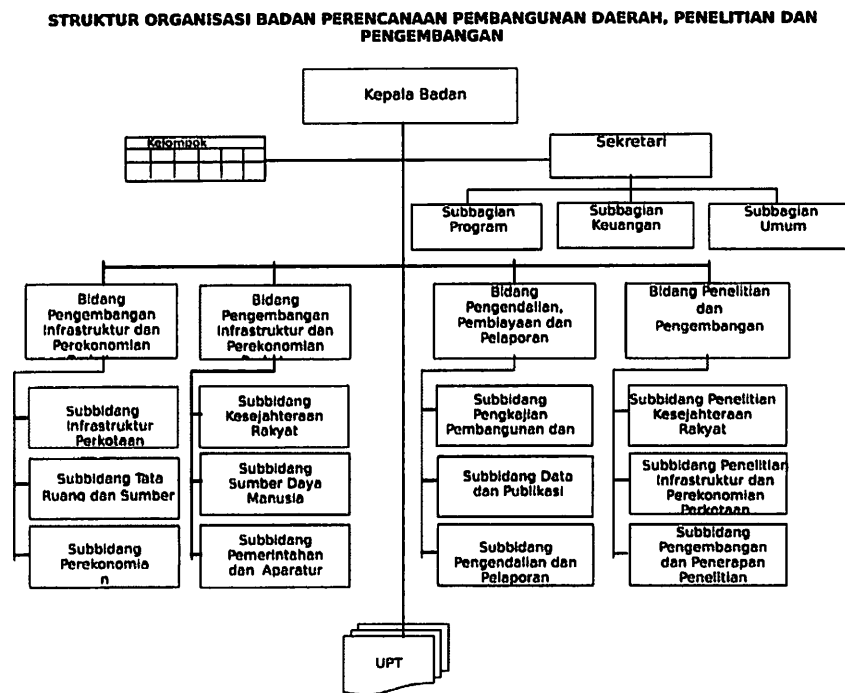
- a. penyusunan Program Pembangunan Daerah yang meliputi:
  1. RPJPD;
  2. RPJMD;
  3. Renstra; dan
  4. RKPD;
- b. pengoordinasian perencanaan perangkat daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lainnya yang sah;

- f. pengoordinasian pengelolaan data dan publikasi pembangunan daerah;
- g. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- h. pengoordinasian penelitian untuk kepentingan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- i. penyelenggaraan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka pembangunan Daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan, Bappeda Litbang Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan.

Bappeda Litbang Kota Balikpapan dipimpin oleh Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 1 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang. Struktur organisasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1

## 1.4 Sumber Daya Aparatur

Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada tahun 2018 memiliki Sumber Daya Aparatur sejumlah 46 orang yang terdiri dari 40 orang pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil dan 6 orang tenaga honorer/kontrak. Perincian pegawai sebagaimana tabel berikut:

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Kepala Badan		√	√				√					
Sekretaris	√		√				√					
Kasubag. Program		√		√				√				
Kasubag. Umum		√		√				√				
Kasubag. Keuangan		√		√					√			
Kabid. Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaann	√			√				√				
Kasubid. Infrastruktur Perkotaan	√			√			√					
Kasubid. Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	√			√				√				
Kasubid. Perekonomian		√		√				√				
Kabid. Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur		√		√				√				
Kasubid. Kesejahteraan Rakyat		√		√				√				
Kasubid. Sumber Daya Manusia	√			√					√			
Kasubid. Pemerintahan dan Aparatur		√		√			√					
Kabid. Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan	√			√				√				
Kasubid. Pengkajian Pembangunan dan Pembiayaan	√			√					√			
Kasubid. Data dan Publikasi	√			√				√				
Kasubid. Pengendalian dan Pelaporan	√			√				√				
Kabid. Penelitian dan Pengembangan	√			√			√					
Kasubid. Penelitian Kesejahteraan Rakyat	√			√				√				
Kasubid. Penelitian Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	√			√				√				
Kasubid. Pengembangan dan Penerapan Penelitian		√		√					√			
<b>Jumlah Pejabat</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Pelaksana/Staf PNS</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Honorer/PTT</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah PNS + Honor/PTT</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

## 1.5 Aspek Strategis Organisasi

Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan. Tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

### 1. Kelembagaan

Kelembagaan Bappeda Litbang Kota Balikpapan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### 2. Mekanisme Perencanaan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).

Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

### 3. Hasil Kinerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan utama dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- a. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota maupun forum Perangkat Daerah (PD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama-sama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi serta Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan;
  - b. Penyusunan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
  - c. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018;
  - d. Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
  - e. Penyusunan Balikpapan Dalam Angka, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kemiskinan Manusia, Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Profil Ekonomi Daerah dan Publikasi Program/kegiatan pembangunan;
  - f. Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan;
  - g. Penyusunan Indeks Pelayanan Infrastruktur dan Kota Layak Huni;
  - h. Penelitian dan Pengembangan Potensi Produksi dan Jaringan Distribusi Gas Mathana pada Zona 1, 2 dan 3 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Manggar.
4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Litbang masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Bappeda Litbang masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi. Perangkat keras untuk mendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan, baik jumlah, teknologi yang dipakai maupun jenisnya.

#### **1.6 Permasalahan Utama (Isu Strategis)**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu: perumusan kebijakan teknis perencanaan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang seringkali ditemui, antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan SKPD lain;
2. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan;
3. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kota Balikpapan serta antar SKPD sehingga terjadi tumpang tindihnya Dokumen Perencanaan;
4. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan;
5. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
6. Terbatasnya data base yang mendukung penyusunan rencana;
7. Kurangnya optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan;
8. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah sehingga menyebabkan *inkonsistensi* perencanaan pembangunan di daerah;
2. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat;
3. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.

Peluang dalam pengembangan pelayanan PD dalam rangka perencanaan pembangunan daerah antara lain :

1. Telah ditetapkannya beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam produk hukum daerah;
2. SDM Aparatur perencana yang sebagian besar berpendidikan tinggi sehingga mempunyai kemampuan dan dedikasi dalam menyusun dan merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
3. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota.

### 1.7 Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung tercapainya Sasaran Strategis serta memperlancar kerja pada Bappeda Litbang Kota Balikpapan memiliki sarana dan prasarana kerja perangkat daerah per 31 Desember 2018, sebagai berikut:

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Gedung	1 900	Unit (2 Lantai) m <sup>2</sup>
2	Listrik	1	Jaringan
3	Air	1	Jaringan
4	Telepon	2	Telepon (1 Fax)
5	Intercome	1	Jaringan (12 line)
6	Jaringan Internet/wifi	5	Jaringan
7	Area Parkir	1	Area
8	Ruang Rapat	5	Ruang
9	Ruang Arsip	1	Ruang
10	Ruang Laktasi	1	Ruang
11	Pantry	1	Ruang
12	Gudang	1	Ruang
13	Ruang <i>Sound System</i>	1	Ruang
14	Ruang Alat Tulis Kantor	1	Ruang
15	Kendaraan Operasional (roda 4)	3	Unit
16	Meja Layanan	1	unit

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Strategis

Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah menetapkan visi sebagai pedoman yang menentukan arah pencapaian tujuan yaitu "Mewujudkan perencanaan daerah dan penelitian pengembangan yang berkualitas, inovatif dan berkelanjutan mendukung Balikpapan Nyaman dihuni".

Visi Bappeda Litbang Kota Balikpapan selaras dengan Visi jangka menengah Kota Balikpapan 2016-2021 yaitu : "Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman" dan visi jangka panjang Kota Balikpapan 2005-2025, yaitu untuk *"Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi : Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman"*. Dalam keterkaitan dengan Visi Kota, maka segenap jajaran Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan memerlukan perencanaan pembangunan yang dapat diandalkan sebagai dasar dari arah kebijakan pelaksanaan pembangunan. Komitmen tersebut harus dimiliki dan disediakan oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan kepada para *stakeholders* sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya yaitu Perencanaan Pembanguna, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan.

Untuk mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kota;
2. Meningkatkan kualitas pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan kota;
3. Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan yang inovatif dan aplikatif.

Dengan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif dan responsif;
2. Meningkatnya pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan kota;
3. Terwujudnya hasil kegiatan kelitbangan yang berkualitas sesuai potensi dan kebijakan pembangunan daerah.

Tercapainya tujuan tersebut di atas, dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan yang mencapai 85%;
2. Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) yang mencapai 40%;

3. Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD dengan target mencapai 100%;
4. Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD dengan target mencapai 95%;
5. Rata-rata Persentase capaian kinerja RPJMD Kota Balikpapan dengan target mencapai 40%;  
serta
6. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dengan target mencapai 100%.

Berdasarkan misi dan tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya data pembangunan yang terintegrasi;
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif;
3. Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah;
4. Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan;
5. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan tujuan serta sasaran strategis Bappeda Litbang Tahun 2017 – 2021 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.1  
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis  
Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2016	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif dan responsif	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Terwujudnya data pembangunan yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	%	60	65	70	75	80	85
	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	%	30	32	34	36	38	40
	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	%	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan kota	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	90	91	92	93	94	95
	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan		Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	%	96.25	20	40	60	80	100
Terwujudnya hasil kegiatan kelitbangan yang berkualitas sesuai potensi dan kebijakan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	91.17	100	100	100	100	100

**Tabel 2.2**  
**Program dan Kegiatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran**  
**Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2021**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif dan responsif	Terwujudnya data pembangunan yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	%	Program Pengembangan Data / Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah</li> <li>2. Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan</li> <li>3. Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ol>
		Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPd)	%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan</li> <li>2. Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan</li> </ol>
		Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan</li> <li>2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian</li> <li>3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam</li> <li>4. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</li> </ol>
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia</li> <li>3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Aparatur</li> <li>4. Kegiatan Fasilitasi Forum CSR</li> <li>5. Kegiatan Pengendalian Sustainable Development Goals (SDGs)</li> <li>6. Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu</li> </ol>

2	Meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan kota	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan 2. Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah 3. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
			Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	%		
3	Terwujudnya hasil kegiatan kelitbang yang berkualitas sesuai potensi dan kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	Program Penelitian dan Pengembangan	1. Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur 2. Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan 3. Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan

Tabel di atas merupakan gambaran keselarasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 tahun. Sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 tahun, maka Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Utama  
Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya data pembangunan yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	$\sum$ Data pembangunan yang dimanfaatkan dibagi dengan $\sum$ Data pembangunan yang terisi dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah/SIPD)	Bid. Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan	Bid. Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	$\sum$ usulan kegiatan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD dibandingkan dengan jumlah usulan kegiatan masyarakat dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan	Bid. Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan	Bid. Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan

3	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	$\sum$ program prioritas dalam Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD dibandingkan dengan $\sum$ program prioritas yang ditetapkan dalam Renstra OPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bid. Pengendalian , Pembiayaan dan Pelaporan, Bid.</li> <li>- Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan</li> <li>- Bid. Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bid. Pengendalian , Pembiayaan dan Pelaporan, Bid.</li> <li>- Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan</li> <li>- Bid. Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur</li> </ul>
4	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	$\sum$ total program-program yang telah ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan $\sum$ total program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD	Bid. Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan	Bid. Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan
		Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	Nilai Capaian Misi dibandingkan dengan $\sum$ Misi	Bid. Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan	Bid. Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan
5	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	$\sum$ Penelitian yang ditindaklanjuti dibagi dengan $\sum$ Penelitian yang dilaksanakan	Bid. Penelitian dan Pengembangan	Bid. Penelitian dan Pengembangan

## 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja ditetapkan setiap tahun dengan mencantumkan target kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun yang merupakan penugasan Wali Kota kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja  
Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya data pembangunan yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	%	70
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	%	34
3	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	%	100
4	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	92
		Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	%	40
5	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	100

### 2.3.1 Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada tahun Anggaran 2018 Bappeda Litbang Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 11.382.511.800,-. Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2018 menjadi Rp. 12.181.506.560,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 6.542.007.000,- dan Belanja Langsung Rp. 5.639.499.560,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 11.385.269.964,50 (93,46%) dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.226.833.643,- (95,18%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.158.436.321,5 (91,47%).

### 2.3.2 Target Belanja Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Tabel 2.5  
Target Belanja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2018

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Tidak Langsung	6.542.007.000,00	6.226.833.643,00	95,18%
2	Belanja Langsung	5.639.499.560,00	5.158.436.321,50	91,47%
<b>Jumlah</b>		<b>12.181.506.560,00</b>	<b>11.385.269.964,50</b>	<b>93,46%</b>

### 2.3.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis  
Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya data pembangunan yang terintegrasi	1.168.760.000,00	20,72%	
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif	384.400.000,00	6,82%	
3	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	615.162.800,00	10,91%	
4	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	341.192.000,00	6,05%	
5	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	785.000.000,00	13,92%	

Selain 5 (lima) Sasaran Strategis di atas, Bappeda Litbang memiliki 2 (dua) program pendukung tercapainya Sasaran Strategis pada Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7  
 Anggaran Belanja Langsung Program Pendukung  
 Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2018

No.	Sasaran Program	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya mutu pelayanan administrasi perkantoran	1.731.447.760,00	30,70%	
2	Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	613.537.000,00	10,88%	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya**

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Nomor : 700/1022/TIM-VIII/ITKOT tanggal 18 Juli 2018 pada Bappeda Litbang Kota Balikpapan, maka hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Laporan Kinerja Bappeda Litbang adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Nilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	21,59	25,49
2	Pengukuran Kinerja	25%	14,82	14,06
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,35	13,11
4	Evaluasi Kinerja	10%	1,13	5,62
5	Capaian Kinerja	20%	13,82	13,50
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	100%	62,17	71,79
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B (Baik)</b>	<b>BB (Sangat Baik)</b>

Penilaian dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Dalam laporan hasil evaluasi terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kota Balikpapan terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda Litbang Kota Balikpapan, adalah sebagai berikut :
- a. Agar menyusun SOP tentang mekanisme pengukuran data kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja;
  - b. Agar evaluasi program tidak hanya sebatas pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran saja, tetapi untuk perbaikan perencanaan kedepannya mempertimbangkan pencapaian target;
  - c. Dalam membuat Laporan Kinerja agar menyajikan analisis yang memadai mengenai adanya efisiensi sumber daya;
  - d. Agar dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi secara periodik dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan perbaikan kedepan dan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata;

- e. Agar hasil pengukuran kinerja mulai dari tingkat eselon IV keatas dikaitkan dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward & punishment*.

Atas rekomendasi Inspektorat Kota Balikpapan, maka Bappeda Litbang pada tahun 2018 melakukan hal-hal berikut sebagai langkah peningkatan kualitas SAKIP antara lain:

- a. Menyusun rancangan pembaharuan SOP tentang pengukuran data kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja;
- b. Melakukan efisiensi anggaran dengan menggunakan prinsip *money follow program* dimana terdapat program dan kegiatan yang tidak dilakukan penganggaran namun tetap memberikan pengaruh terhadap capaian kinerja organisasi. Hal ini terjadi dikarenakan pada program dan kegiatan tersebut dapat tetap terlaksana dengan program dan kegiatan lainnya. Pada usulan program dan kegiatan Bappeda Litbang Tahun 2019 terdapat 2 (dua) program dengan 9 (sembilan) kegiatan yang tidak dilakukan penganggaran yaitu sebagai berikut :
- c. Telah melakukan inovasi dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi secara periodik dalam rangka mengendalikan kinerja. Dengan mengembangkan aplikasi Sipintar secara online. Meski penggunaan aplikasi tersebut belum berjalan sepenuhnya. Pengawasan dan evaluasi pencapaian kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan dengan laporan sebagaimana terlampir;
- d. Pengukuran capaian kinerja tidak hanya sebatas Kinerja Organisasi namun sampai dengan capaian kinerja individu;
- e. Bappeda litbang Kota Balikpapan telah menyusun rancangan Sasaran Kerja Pegawai untuk Tahun 2019 dengan menyelaraskan Sasaran Strategis dengan cascading serta tugas dan fungsi masing-masing individu dari tingkat pimpinan sampai dengan pelaksana.

### 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya data pembangunan yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	%	70	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	70%	70,35	100,5
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	%	34	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	34%	36,68%	107.88
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-

3	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	%	100	Triwulan I	100%	93,84%	93,84
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
4	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPd dengan RPJMD	%	92	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	92%	100%	108,7
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	%	40	Triwulan I	-	-	-	
				Triwulan II	-	-	-	
				Triwulan III	-	-	-	
				Triwulan IV	40%	40,03%	100,01	
5	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	100	Triwulan I	25%	-	-
					Triwulan II	25%	-	-
					Triwulan III	25%	-	-
					Triwulan IV	25%	100%	100%

### 3.3 Analisis Capaian Kinerja

Pada Rencana Strategis Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja.

Sasaran strategis Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang pertama adalah Terwujudnya data yang terintegrasi dengan indikator kinerjanya adalah persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan telah berupaya melaksanakan amanat pembangunan di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Capaian sasaran strategis Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut:

Pencapaian indikator kinerja Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	PENCAPAIAN %
Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	70	70,35	100,5

Pada sasaran strategis yang pertama tingkat pencapaian keberhasilan diukur dengan indikator kinerja Persentase data terintegrasi yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan urusan pada UU No. 23 Tahun 2014. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagaimana tersaji dalam tabel di atas.

Sebagai SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Bappeda Litbang Kota Balikpapan memiliki tanggungjawab dalam pengkoordinasian perencanaan pembangunan dengan melakukan perencanaan, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknisnya serta memiliki fungsi pengoordinasian pengelolaan data dan publikasi pembangunan daerah.

Pengoordinasian pengelolaan data dan publikasi pembangunan daerah merupakan salah satu fungsi utama Bappeda Litbang Kota Balikpapan dengan berlandaskan peraturan yang berlaku. Dalam pengelolaan data untuk perencanaan pembangunan daerah didasarkan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 274 yang menyatakan **"PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIDASARKAN PADA DATA DAN INFORMASI YANG DIKELOLA DALAM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH"** artinya bahwa perencanaan pembangunan daerah harus berlandaskan atas data dan informasi pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau dengan singkatan SIPD.

Sejalan dengan pasal 274, bahwa untuk mendukung pasal tersebut, selanjutnya ditetapkan Permendagri 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan selanjutnya pada tahun 2017 ditetapkan kembali Permendagri 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai pengganti Permendagri 8 Tahun 2014. Permendagri pengganti tersebut bertujuan 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah; 3. Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

Sejalan dengan ditetapkannya Permendagri 98 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SIPD) sebagai pengganti Permendagri 8 Tahun 2014, pada Bab II Pasal 3 menekankan bahwa :

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan, pengumpulan, pengisian, validasi, serta evaluasi data pembangunan daerah dengan menggunakan aplikasi Data Bersbabsi Elektronik/e-Database.
- (2) Data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Data statistik dasar yang diperoleh dari publikasi lembaga yang membidangi penyelenggaraan pusat statitik;

b. Data statistik sektoral yang diperoleh dari perangkat daerah berdasarkan indikator pembangunan daerah.

(3) Data statistik dasar dan data statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Data tunggal; dan

b. Data komposit.

Sehubungan dengan pengelolaan data di daerah pada pasal 6 (1) menyatakan bahwa Pengelolaan aplikasi Data berbasis elektronik/e-Database daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya dilakukan melalui tahapan; a) pemetaan kebutuhan data; b) pengumpulan data; c) pengisian data hasil pengumpulan ke dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database; d) evaluasi data.

Selanjutnya ayat (2) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), perangkat daerah bertugas selaku produsen data, dan ayat (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan statistik bertugas sebagai wali data.

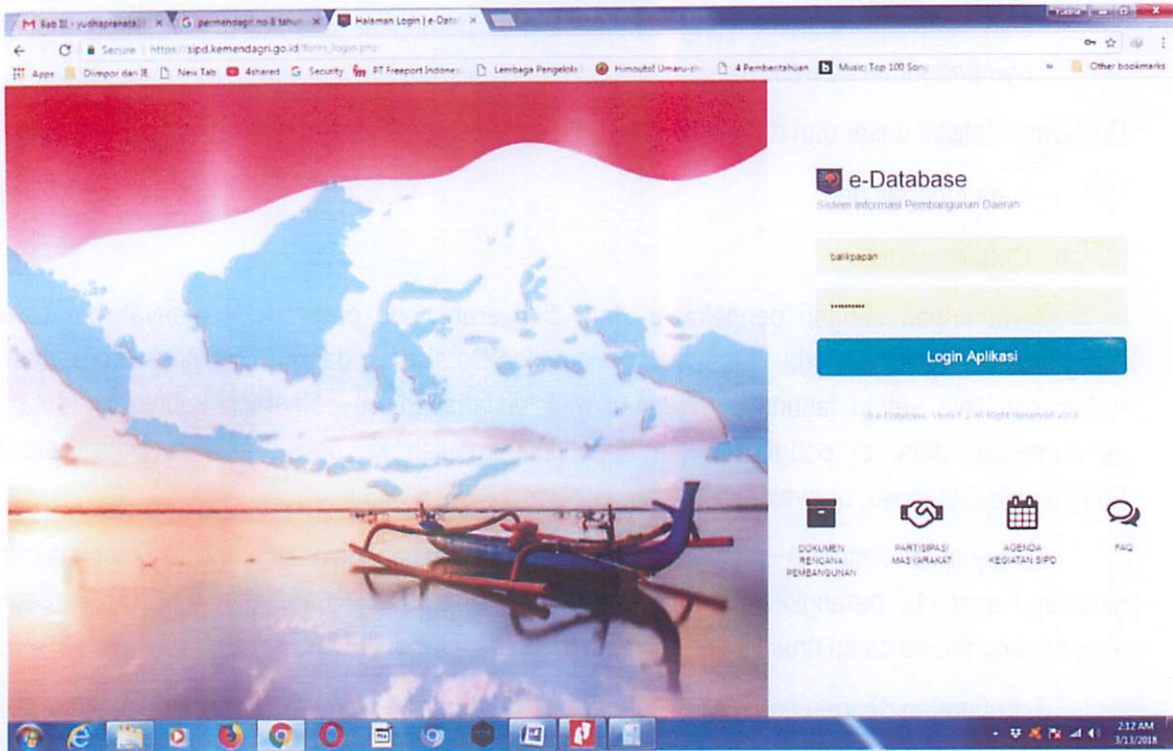
Sehubungan dengan penjelasan pasal dan ayat tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan perlu melakukan tindak lanjut dalam mengimplementasikan Permendagri 98 Tahun 2018 tentang SIPD dalam usaha membangun kota dengan memanfaatkan dan menggunakan data sebagai dasar dan pedoman dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Sejalan dengan dengan UU 23/2014, dalam aturan pelaksanaan SIPD baik pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Permendagri ini diterbitkan sebagai perkuatan dan dukungan terhadap implementasi SIPD pada diktum menimbang dengan penjelasan sebagai berikut :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu mengumpulkan dan mengisi data pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Berdasarkan undang undang dan peraturan yang menjadi landasan pada SIPD tersebut, Pemerintah Kota dengan didukung oleh Bappeda Litbang telah mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut dalam pelaksanaan pemuktahiran data pada SIPD melalui aplikasi dengan alamat <http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/>. Berikut tampilan format aplikasi baru SIPD yang dibangun oleh Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

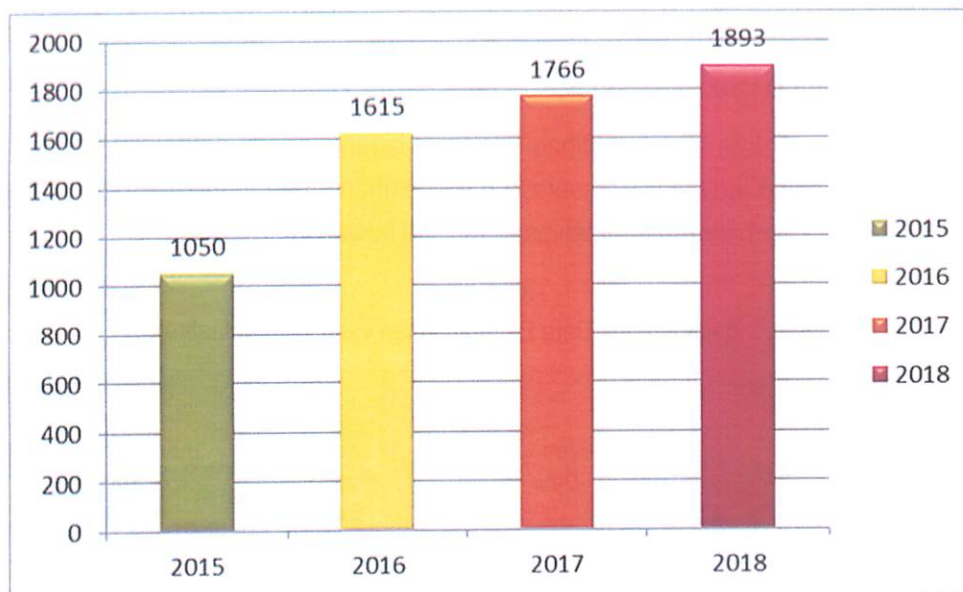


Gambar 3.1  
Tampilan dashboard e-Database SIPD

Terkait dengan pemuktahiran data yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang, diharapkan pemerintah kota Balikpapan memiliki ketersediaan data dan informasi pada tiap tahun pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan dan data tersebut dapat termanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah dan masyarakat serta stake holder di Kota Balikpapan guna meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Hasil pemuktahiran data SIPD Pada tahun 2017 untuk realisasi ketersediaan data mencapai 65,64% dari jumlah target isian variable data yang tersedia pada SIPD sebanyak 2691 data sebagai target 100% artinya dari jumlah data target yang harus di inputkan/diisikan pada aplikasi SIPD sebanyak 2691 data pada 8 Kelompok Data yang meliputi data umum; data sosial budaya; data sumber daya alam; data infrastruktur; data ekonomi; data keuangan daerah; politik, hukum dan keamanan; dan insidensial, Pemerintah Kota Balikpapan bersama Bappeda Litbang serta perangkat daerah hanya mampu mengisikan data pada 8 (delapan) kelompok data sebagai realisasi dari target sebesar 1766 data. Merujuk pada capaian kinerja target Renstra Bappeda tahun 2017 sebesar 65% untuk ketersediaan data, bahwa capaian kinerja Renstra pada Tahun 2017 adalah mencapai 100,98%. Sedangkan capaian untuk pemanfaatan data belum diukur sebagai indikator.

Sejalan dengan capaian kinerja Renstra bappeda tersebut, bahwa pencapaian keterisian data pada SIPD tahun 2017 sejumlah 1766 data merupakan suatu capaian kinerja yang meningkat jika dibandingkan dengan dari tahun 2016 untuk data yang tersedia. Pada Tahun 2016 realisasi ketersediaan data sebesar 100% atau 1615 data. Berikut perkembangan ketersediaan data tahun 2015-2018 berdasarkan gambar grafik dibawah ini.



Gambar 3.2  
Ketersediaan data Pada SIPD Kota Balikpapan

Berdasarkan gambar grafik tersebut diatas menunjukkan adanya peningkatan untuk ketersediaan data pada tahun 2018 berdasarkan target yang ditetapkan pada Renstra, maka pencapaian kinerja pada ketersediaan data SIPD dinilai dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas perencanaan yang disusun pada tahun 2018. Kualitas perencanaan tersebut merupakan *outcome* (hasil) dari pencapaian sasaran strategis ditinjau dari basis ketersediaan data pada Pemerintah Kota Balikpapan.

Sebagaimana uraian penjelasan capaian dari ketersediaan data pada aplikasi SIPD tersebut, bahwa Bappeda Litbang pada tahun 2018 target capaian ketersediaan data pada aplikasi SIPD mencapai 70% atau 1884 data dari jumlah data target inputan sebanyak 2691 data. Berdasarkan Renstra tahun 2016-2021 Bappeda Litbang ukuran indikator diukurkan atas Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan. Adapun formulasi pencapaian indikator :

$$\text{Pemanfaatan Data (\%)} = \frac{\sum \text{Data terinput yang dimanfaatkan}}{\sum \text{Data yang terinput}}$$

Berdasarkan aplikasi SIPD tahun 2017, Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 23/2014 dan di entri berdasarkan 9 Kelompok data :

1. Kondisi Geografi
2. Demografi
3. Potensi Sumber Daya
4. Ekonomi dan Keuangan
5. Daerah
6. Aspek Kesejahteraan
7. Masyarakat

8. Aspek Pelayanan Umum

9. Aspek Daya Saing Daerah

Dari 9 kelompok data tersebut, dibagi dalam 3 bidang urusan data yaitu Wajib, Pilihan dan Umum. Adapun capaian indikator Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan tersaji pada table di bawah ini.

Tabel 3.1.  
Capaian Indikator untuk Data Pembangunan yang Termanfaatkan

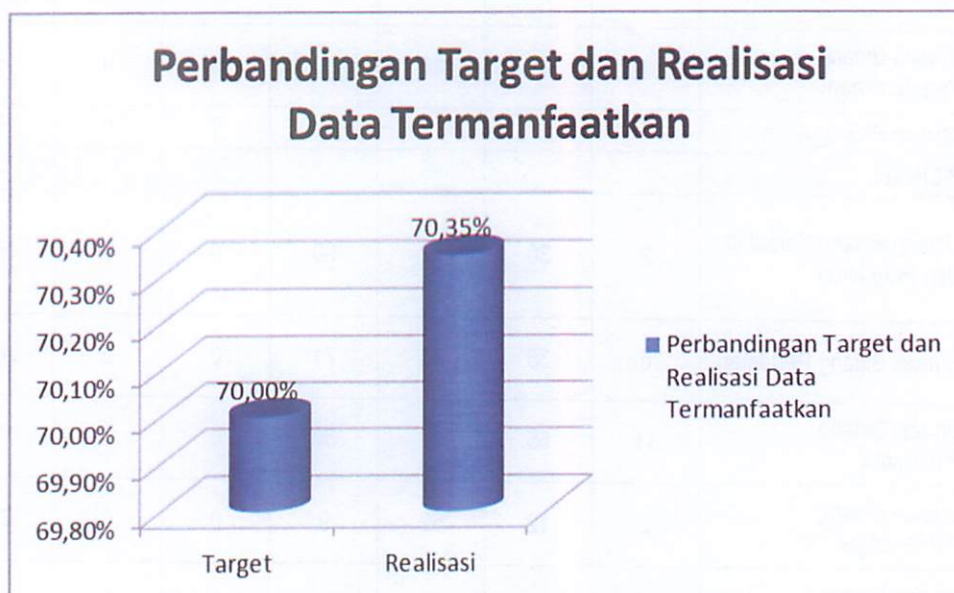
No	Data Urusan/Bidang	Header Data	Elemen Data	Sub Elemen Data	Sub Sub Elemen Data	Sub Sub Sub Elemen Data	Jumlah Data	Pemanfaatan Data
1	<b>WAJIB</b>							
1	Urusan Bidang Pendidikan	7	53	54	8	0	115	112
2	Urusan Bidang Kesehatan	3	8	60	18	0	86	85
3	Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	34	112	3	0	149	21
4	Urusan Bidang Trantibum	3	17	58	57	0	132	129
5	Urusan Bidang Sosial	7	36	82	60	0	178	165
6	Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman	7	26	23	6	0	55	27
7	Urusan Bidang Tenaga Kerja	5	25	22	2	0	49	35
8	Urusan Bidang Lingkungan Hidup	4	41	38	7	0	86	83
9	Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	15	43	22	0	80	43
10	Urusan Bidang Pangan	4	16	53	0	0	69	22
11	Urusan Bidang Pertanahan	5	23	11	0	0	34	21
12	Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	23	56	64	0	143	140

No	Data Urusan/Bidang	Header Data	Elemen Data	Sub Elemen Data	Sub Sub Elemen Data	Sub Sub Sub Elemen Data	Sub Sub Sub Sub Elemen Data	Jumlah Data	Pemanfaatan Data
13	Urusan Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	2	8	18	14	0	0	40	38
15	Urusan Bidang Perhubungan	4	22	51	46	0	0	119	119
16	Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	16	52	32	0	0	100	90
17	Urusan Bidang Komunikasi dan Informasi	4	10	20	14	0	0	44	19
18	Urusan Bidang Penanaman Modal	3	5	18	120	0	0	143	60
19	Urusan Bidang Pemuda dan Olah Raga	2	6	49	79	0	0	134	82
20	Urusan Bidang Budaya	4	17	35	40	0	0	92	41
21	Urusan Bidang Perpustakaan	1	11	46	59	0	0	116	110
22	Urusan Bidang Arsip	1	1	1	1	0	0	3	1
II	<b>PILIHAN</b>								
1	Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan	2	30	72	60	0	0	162	43
2	Urusan Bidang Pertanian	5	36	95	71	0	0	202	86
3	Urusan Bidang Pariwisata	11	55	51	30	0	0	136	107
4	Urusan Bidang Perdagangan	2	12	52	9	0	0	73	27
5	Urusan Bidang Kehutanan	1	10	63	14	9	0	96	9
6	Urusan Bidang Perindustrian	5	44	163	36	0	0	243	28
7	Urusan Bidang Transmigrasi	1	10	32	32	0	0	74	0

No	Data Urusan/Bidang	Header Data	Elemen Data	Sub Elemen Data	Sub Sub Elemen Data	Sub Sub Sub Elemen Data	Sub Sub Sub Sub Elemen Data	Jumlah Data	Pemanfaatan Data
8	Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	4	39	123	94	98	0	354	
III	<b>UMUM</b>								
1	Urusan Bidang Umum	2	14	34	68	78	14	208	150
	<b>JUMLAH</b>	110	663	1587	1066	185	14	3307*	1893

Sumber : pengolahan data pada kertas kerja data SIPD Tahun 2018, Bappeda Litbang Bidang Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan.

Berdasarkan table 3.1. bahwa jumlah data pada SIPD adalah 3307 data yang merupakan akumulasi penjumlahan elemen data dan sub elem data. Bahwa capaian data termanfaatkan berdasarkan jumlah elemen data 3307 adalah 1893 data. Merujuk pada Renstra periode II tahun 2018 maka untuk target capaian 70% data yang termanfaatkan adalah tercapai. Ketercapaian diukur atas dasar perbandingan kondisi data perencanaan sebesar **2691 data** terhadap data yang dimanfaatkan yaitu sebesar **1893 data**. Adapun capaian pemanfaatan data hasil perbandingan yaitu **70,35%** artinya melampaui dari yang ditargetkan sebesar 70%. Berikut disajikan pada gambar grafik dibawah ini.



Gambar 3.3  
Data Pembangunan SIPD yang Termanfaatkan

Sehubungan dengan capaian sasaran indikator maka capaian kinerja dari Perjanjian kinerja Perangkat Daerah Kepala Bappeda Litbang sebesar 100,50%. Dihitung dengan menggunakan rumus formula dibawah ini.

$$K_{\text{Pemanfaatan data (\%)}} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Upaya yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Litbang untuk meningkatkan capaian kinerja “Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan” adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan review penyusunan rencana program dan kegiatan pada perangkat daerah guna menyalurkan pencapaian outcome dan output sesuai dengan amanat UU 23/2014 dan Permendagri 8/2014 serta Permendagri 86/2017.
- b. Melakukan sosialisasi fungsi dan nilai tambah SIPD dalam mewujudkan perencanaan yang berkualitas.
- c. Membangun One Map One data untuk mewujudkan data yang akurat, tervalidasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Meningkatkan ketersediaan data dan pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan daerah kota Balikpapan.

Untuk meningkatkan keterisian data SIPD ini diharapkan pemerintah daerah membuat suatu kebijakan tentang SIPD seperti membuat payung hukum teknis dan mekanisme pengelolaan penyediaan dana, melakukan MoU dengan BPS dan instansi lain seperti BMG dan BPN, dimana Instansi tersebut sangat erat hubungannya dengan perkembangan yang ada di Kota Balikpapan.

Perbandingan Capaian Tahunan  
Tahun 2017 – 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	65%	65,64%	70%	70,35%

Pada sasaran strategis yang kedua yang pencapaian targetnya diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja tersaji dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (%)
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	34%	36,68%	107,88%

Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan Indikator pada sasaran strategis yang kedua. Realisasi capaian kinerja diperoleh dari rekapitulasi usulan/masyarakat dari setiap tingkat

kecamatan yang terakomodir dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.3.  
Rekapitulasi Usulan Masyarakat

No	Kecamatan	Jumlah Usulan Masyarakat (usulan)
1	Balikpapan Kota	105
2	Balikpapan Tengah	246
3	Balikpapan Barat	252
4	Balikpapan Utara	373
5	Balikpapan Selatan	156
6	Balikpapan Timur	381
	<b>Total Usulan</b>	<b>1.513</b>

Berdasarkan hasil rekapitulasi usulan masyarakat Kota Balikpapan pada tahun 2017 untuk rencana pembangunan daerah tahun 2018 jumlah keseluruhan usulan adalah sebanyak 1.513 usulan baik untuk bidang infrastruktur (fisik), kesejahteraan rakyat (sosial budaya) serta perekonomian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.  
Rekapitulasi Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2017

KECAMATAN	USULAN KEGIATAN						TOTAL	
	FISIK		SOSBUD		EKONOMI			
	Σ	Rp	Σ	Rp	Σ	Rp	Σ	Rp
Balikpapan Timur	272	399.971.474.669	58	8.914.000.000	51	20.018.180.00	381	428.903.654.669
Balikpapan Tengah	205	15.546.730.000	27	3.033.980.000	14	35.000.000	246	18.615.710.000
Balikpapan Utara	296	88.209.887.737	52	5.440.450.000	25	0	373	93.650.337.737
Balikpapan Selatan	69	8.091.969.940	66	3.762.800.000	21	3.325.000000	156	15.179.769.940
Balikpapan Kota	67	53.051.550.300	20	1.685.250.000	18	893.500.000	105	55.610.300.300
Balikpapan Barat	168	7.343.915.781.000	63	16.549.000.000	21	1.260.000.000	252	7.361.724.781.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.077</b>	<b>7.908.787.393.646</b>	<b>286</b>	<b>39.365.480.000</b>	<b>150</b>	<b>25.531.680.000</b>	<b>1.513</b>	<b>7.973.684.553.646</b>

Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2017 merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam kegiatan Musrenbang Tingkat Kota bersamaan dengan penyampaian kemampuan Rencana APBD Kota Balikpapan Tahun 2018. Dari hasil pembahasan usulan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran serta dokumen perencanaan Perangkat Daerah terkait, maka diperoleh data usulan masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

No	Jenis Usulan	Jumlah
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong I	17
2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong II	7
3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong III	10
4	Pembangunan Jalan	2
5	Pembangunan Jembatan	1
6	Peningkatan Jalan I	8
7	Peningkatan Jalan II	20
8	Peningkatan Jalan III	5
9	Peningkatan Jalan IV	90
10	Peningkatan Jembatan	6
11	Peningkatan Jalan Lingkungan I	50
12	Peningkatan Jalan Lingkungan II	225
13	Peningkatan Drainase Lingkungan I	55
14	Peningkatan Drainase Lingkungan II	62
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	2
<b>Total Usulan</b>		<b>555</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD adalah sebanyak 555 usulan, sedangkan secara total keseluruhan usulan masyarakat yang diusulkan melalui tingkat Kelurahan adalah sebanyak 1.513 usulan yang menjadi bahan pembahasan dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah diukur dengan membandingkan jumlah usulan yang terakomodir dalam RKPD dengan jumlah keseluruhan usulan masyarakat hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan.

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat aspirasi yang terakomodir} &= \frac{\sum \text{usulan yang terakomodir}}{\sum \text{usulan hasil Musrenbang Kecamatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{555 \text{ usulan}}{1.513 \text{ usulan}} \times 100\% \\
 &= 36,68\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2018 target Bappeda Litbang target yang diharapkan tercapai untuk tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 34%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa realisasi melebihi target target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 36,68% atau sebesar 107,88%.

Tercapainya target pada tahun 2018 didorong oleh semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tata cara pengajuan usulan rencana pembangunan daerah.

Kondisi keuangan Pemerintah Kota Balikpapan yang secara bertahap mengalami kondisi yang stabil juga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah usulan masyarakat yang dapat diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah.

Kebijakan perencanaan pembangunan yang memberikan prioritas lebih terhadap pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.

Keselarasannya usulan masyarakat dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait juga memberikan pengaruh terhadap tingkat terakomodirnya usulan masyarakat.

Kedepan dengan diterapkannya penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan (<http://sip.balikpapan.go.id>) yang berbasis *online* dapat semakin meningkatkan kualitas pembangunan daerah Kota Balikpapan. Dimana masyarakat memiliki akses ke dalam sistem tersebut dan dapat secara langsung menyampaikan usulan dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Sosialisasi tentang tata cara penyampaian usulan rencana pembangunan serta mekanisme penyusunan dokumen perencanaan daerah kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan kota Balikpapan.

Indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya karena dalam Sasaran Strategis pada tahun periode tahun perencanaan 2011 – 2016 tidak terdapat indikator tersebut.

Perbandingan Capaian Tahunan  
Tahun 2017 – 2018

SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	32%	16,5%	34%	36,68%

Pada sasaran strategis yang ketiga yaitu Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah pencapaian targetnya diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja tersaji dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS (3)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN %
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	Persentase keselarasan Renja OPD dengan renstra OPD	100%	93,84%	93,84

Dalam rangka mengimplementasikan Permendagri 86 Tahun 2017, Bappeda Litbang kota Balikpapan melakukan pengukuran terhadap tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan dalam hal ini dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan pengukuran tersebut, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Renja Tahun 2018 dan Renstra Periode II (dua).

Berdasarkan hal tersebut, keselarasan ditinjau dari jumlah program dan jumlah kegiatan yang diusulkan pada renja tahun 2018 oleh OPD Kota Balikpapan.

Adapun jumlah Program yang diusulkan pada Rencana Kerja terhadap jumlah program pada Renstra di tiap OPD tahun 2018, tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1.  
Perbandingan Jumlah Program Renstra Terhadap Renja  
Tahun 2018

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Evaluasi Keselarasan	Tingkat Capaian Keselarasan Program Renja vs Renstra
		Renstra	Renja	Sesuai	Selisih		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17	14	14	3	Tidak Konsisten	82.35%
2	Dinas Kesehatan	9	9	9	0	Konsisten	100.00%
3	RSKB.Sayang Ibu	5	5	5	0	Konsisten	100.00%
4	RSUD Kota Balikpapan	7	3	3	4	Tidak Konsisten	42.86%
5	Dinas Pekerjaan Umum	16	14	14	2	Tidak Konsisten	87.50%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	10	10	2	Tidak Konsisten	83.33%
7	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	7	7	7	0	Konsisten	100.00%
8	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	10	10	10	0	Konsisten	100.00%
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	9	9	9	0	Konsisten	100.00%
10	Dinas Perhubungan	17	15	15	2	Tidak Konsisten	88.24%
11	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	6	6	6	0	Konsisten	100.00%
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	12	12	0	Konsisten	100.00%
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	8	8	0	Konsisten	100.00%
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan	12	12	12	0	Konsisten	100.00%

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Evaluasi Keselarasan	Tingkat Capaian Keselarasan Program Renja vs Renstra
		Renstra	Renja	Sesuai	Selisih		
15	Dinas Ketenagakerjaan	7	7	7	0	Konsisten	100.00%
16	Dinas Sosial	6	6	6	0	Konsisten	100.00%
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian	8	8	8	0	Konsisten	100.00%
18	Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kota Balikpapan	9	9	9	0	Konsisten	100.00%
19	Kantor Kesbang & Politik	12	6	6	6	Tidak Konsisten	50.00%
20	Satuan Polisi Pamong Praja	12	8	8	4	Tidak Konsisten	66.67%
21	Sekretariat Daerah	34	33	33	1	Tidak Konsisten	97.06%
22	Sekretariat Dewan	6	6	6	0	Konsisten	100.00%
23	Badan Pengelola Keuangan Daerah	7	7	7	0	Konsisten	100.00%
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	7	7	0	Konsisten	100.00%
25	Inspektorat Kota	4	4	4	0	Konsisten	100.00%
26	Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	4	4	4	0	Konsisten	100.00%
27	Kec.Balikpapan Timur	14	13	13	1	Tidak Konsisten	92.86%
28	Kec.Balikpapan Barat	6	6	6	0	Konsisten	100.00%
29	Kec.Balikpapan Utara	10	10	10	0	Konsisten	100.00%
30	Kec.Balikpapan Tengah	10	10	10	0	Konsisten	100.00%
31	Kec.Balikpapan Selatan	17	17	17	0	Konsisten	100.00%
32	Kec.Balikpapan Kota	8	7	7	1	Tidak Konsisten	87.50%
33	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Balikpapan	7	7	7	0	Konsisten	100.00%
34	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	15	15	15	0	Konsisten	100.00%
35	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	13	13	13	0	Konsisten	100.00%
36	Dinas Perdagangan	9	9	9	0	Konsisten	100.00%

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Evaluasi Keselarasan	Tingkat Capaian Keselarasan Program Renja vs Renstra
		Renstra	Renja	Sesuai	Selisih		
	JUMLAH	339	346	302	37	26/10	93.84%

Berdasarkan tabel perbandingan jumlah program pada Renstra terhadap Jumlah program pada Renja Tahun 2018 menunjukkan tingkat keselarasan dengan kurang dari 100 %. Capaian untuk hasil pengukuran keselarasan program antara Renja terhadap Renstra OPD mencapai 93,84%. Capaian tersebut meningkat 4,82% dari tahun 2017 dengan capaian 89,02%.

Nilai capaian 89,02 tersebut diukur dengan membandingkan jumlah program pada Renstra yang direncanakan pada periode II sebesar 339 Program yang terakumulasi pada jumlah program pada seluruh OPD terhadap Renja OPD sebesar 346 program yang terakumulasi untuk seluruh OPD, maka capaian keselarasan untuk jumlah total keseluruhan program yang sesuai dengan Renstra sebesar 302 program atau dengan capaian keselarasan mencapai 93,84%.

Dengan capaian keselarasan program tersebut, untuk OPD yang memiliki antar dokumen perencanaan adalah 26 OPD dan yang kurang selaras sejumlah 10 OPD. Adapun 26 OPD yang memiliki keselarasan mencapai 100% sebagai berikut :

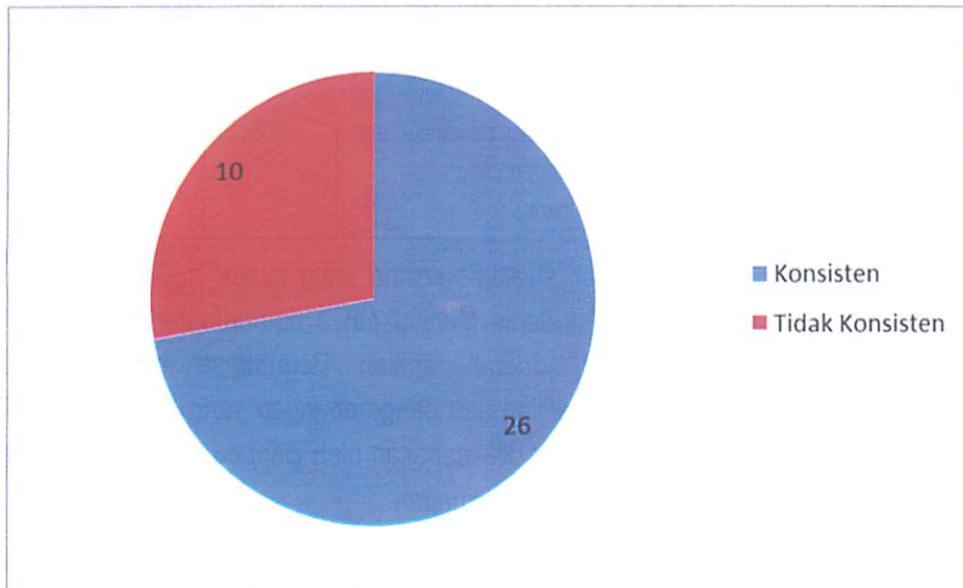
- 1 Dinas Kesehatan
- 2 RSKB.Sayang Ibu
- 3 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan
- 4 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
- 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- 6 Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
- 7 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan
- 10 Dinas Ketenagakerjaan
- 11 Dinas Sosial
- 12 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
- 13 Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kota Balikpapan
- 14 Sekretariat Dewan
- 15 Badan Pengelola Keuangan Daerah
- 16 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 17 Inspektorat Kota

- 18 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- 19 Kec.Balikpapan Barat
- 20 Kec.Balikpapan Utara
- 21 Kec.Balikpapan Tengah
- 22 Kec.Balikpapan Selatan
- 23 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Balikpapan
- 24 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan
- 25 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
- 26 Dinas Perdagangan

Sedangkan perangkat daerah yang memiliki tingkat keselarasan kurang dari 100% adalah :

- 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2 RSUD Kota Balikpapan
- 3 Dinas Pekerjaan Umum
- 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 5 Dinas Perhubungan
- 6 Kantor Kesbang & Politik
- 7 Satuan Polisi Pamong Praja
- 8 Sekretariat Daerah
- 9 Kec.Balikpapan Timur
- 10 Kec.Balikpapan Kota

Terkait dengan capaian keselarasan program tersebut, berikut ini disajikan grafik capaian pada tiap urusan pemerintah daerah Kota Balikpapan.



Gambar 3.4  
Jumlah Capaian Keselarasan Antar Dokumen Renstra dan Renja OPD

Keberhasilan sasaran strategis yang keempat adalah meningkatnya capaian kinerja dan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yang pertama yaitu persentase capaian kinerja RPJMD Kota Balikpapan, hal ini tergambar dalam table berikut:

SASARAN STRATEGIS (4)	INDIKATOR KINERJA (1)	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN %
Meningkatnya capaian kinerja	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	92%	100%	108,7

Indikator tersebut merupakan ukuran tingkat ketercapaian yang diperoleh dengan melakukan perhitungan terhadap program-program yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan membandingkan terhadap program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Selain indikator tersebut, terdapat indikator yang kedua yaitu persentase capaian kinerja RPJMD Kota Balikpapan.

SASARAN STRATEGIS (4)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN %
Meningkatnya capaian kinerja	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	40%	40,03%	100,01

SASARAN STRATEGIS (5)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Tabel di atas merupakan sasaran strategis kelima yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja. Indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah adalah Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti. Penelitian dan pengembangan yang dimaksud adalah dapat berupa penelitian, studi ataupun kajian yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan maupun OPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti adalah merupakan hasil yang direkomendasikan dari penelitian, studi ataupun kajian. Hasil dapat ditindaklanjuti oleh OPD pelaksana kegiatan dan juga oleh OPD lain yang terkait yang dapat berupa kebijakan ataupun kegiatan-kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan melalui penelitian dan pengembangan pada Pemerintah Kota Balikpapan dibutuhkan suatu perhatian terhadap sejumlah dokumen kajian/penelitian yang telah disusun pada tahun anggaran yang lalu hingga akhir tahun anggaran 2018.

Berdasarkan hasil pengumpulan data terhadap jumlah dokumen kajian/penelitian yang telah disusun oleh Perangkat Daerah pada tahun 2017 adalah sebanyak 6 dokumen. Adapun hasil inventarisasi dokumen kajian /penelitian yang telah terdata pada perangkat daerah sebagai berikut.

No	Judul Dokumen Kajian / Penelitian	Tahun Penelitian	Jumlah	Satuan	Status Tindak Lanjut		Perangkat yang Melakukan Penelitian	Bentuk tindak lanjut
					Ya	Tidak		
1	Penyusunan informasi status kerusakan hutan dan tanah untuk produk (Biomassa) tahun 2007	2017	1	Dokumen	1		Dinas Lingkungan Hidup	dipergunakan sebagai salah satu acuan Pemerintah Daerah dalam penyusunan langkah tindak lanjut untuk meningkatkan, memelihara, melestarikan serta memperbaiki kualitas tanah dan/ atau lahan
2	Kajian Kelayakan Pelabuhan Sumber	2017	1	Dokumen	1		Dinas Perhubungan	Sebagai salah satu acuan/bahan dalam pengambilan kebijakan/keputusan pengaktifan kembali Pelabuhan Sumber

No	Judul Dokumen Kajian / Penelitian	Tahun Penelitian	Jumlah	Satuan	Status Tindak Lanjut		Perangkat yang Melakukan Penelitian	Bentuk tindak lanjut
					Ya	Tidak		
3	Studi Kelayakan Pengembangan Saprasi Pendidikan di kec. Balut Jenjang SD	2017	1	Dokumen	1		Dinas Pendidikan	Dipergunakan sebagai acuan dalam Pengembangan Saprasi Pendidikan di Kec. Balut Jenjang SD
4	Studi kelayakan pengembangan Saprasi Pendidikan di Kec. Balut Jenjang SMP	2017	1	Dokumen	1		Dinas Pendidikan	Dipergunakan sebagai acuan dalam pengembangan Saprasi Pendidikan di Kec. Balut Jenjang SMP
5	Indeks Pelayanan Infrastruktur dan Kota Layak Huni	2017	1	Dokumen	1		Bappeda Litbang	Sebagai bahan peningkatan pelayanan infrastruktur guna mencapai kota layak huni
6	Survey Indeks Persepsi Korupsi Kota di Kota Balikpapan	2017	1	Dokumen	1		Bappeda Litbang	Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan untuk mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi.

Berdasarkan capaian kinerja Bappeda Litbang Tahun 2018, maka dapat diketahui pencapaian kinerja Bappeda Litbang pada tahun kedua Renstra Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2018
			2017	2018	
1	2	3	4	5	6 (5-4/4*100%)
1	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	%	65,64	70,35	7.15
2	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	%	16,5	36,68	122.30

3	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	%	89,02	93,84	5.41
4	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100	100	-
5	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	%	20,78	40,03	92.64
6	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	94,74	100	5.55

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	%	85%	70.35%	82,76%
2	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	%	40%	36,68%	91,7%
2	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	%	100%	93,84%	93,84%
4	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	95%	100%	105.26%
5	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	%	100%	40.3%	40,3%
6	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%

Renstra : untuk Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- keberhasilan/kegagalan
- peningkatan/penurunan
- alternatif solusi

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6 (4-5)

### 3.4 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan kinerja Bappeda Litbang tahun 2018 diperlukan anggaran pada program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis, berikut diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Realisasi anggaran berdasarkan dengan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya data pembangunan yang terintegrasi	70	70.35	100,5	1.168.760.000,-	1.081.407.834,-	92,53
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif	34	36.68		384.400.000,-	328.268.109,-	85,40
3	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dengan perencanaan pembangunan jangka menengah	100	93,84	93,84	615.162.800,-	543.735.240,-	88,39%
4	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	92	100		341.192.000,-	315.092.945,-	92,35%
		40	40,03	100,07			
5	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100	100	100	785.000.000,-	709.229.949,-	90,35%

	dalam pembangunan daerah						
Jumlah				3.294.514.800,-	2.977.734.077,-	90,38	
<b>Total Belanja Langsung</b>				<b>5.639.499.560,-</b>	<b>5.158.436.321,50</b>	<b>91,47</b>	

## 2. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>1.168.760.000,00</b>	<b>1.081.407.834,00</b>	<b>92,35</b>	
	Penyusunan Data Profile Daerah	108.760.000,00	92.420.100,00	84,98	
	Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan	1.000.000.000,00	931.676.234,00	93,17	
	Pengelolaan Data Pembangunan	60.000.000,00	57.311.500,00	95,52	
<b>2</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>384.400.000,00</b>	<b>328.268.109,00</b>	<b>85,40%</b>	
	Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKP	300.000.000,00	248.100.319,00	82,70	
	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD dan Perubahan APBD Balikpapan.	84.400.000,00	80.167.790,00	94,99	
<b>3</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur</b>	<b>304.198.800,00</b>	<b>258.535.816,00</b>	<b>84,99%</b>	
	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Balikpapan	170.566.300,00	161.596.060,00	94,74	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Balikpapan	53.632.500,00	34.457.275,00	64,25	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	80.000.000,00	62.482.481,00	78,10	
<b>4</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian</b>	<b>310.964.000,00</b>	<b>285.199.424,00</b>	<b>91,71%</b>	

	<b>Perkotaan</b>				
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	206.000.000,00	193.240.213,00	93,81	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	31.796.000,00	27.933.732,00	87,85	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	30.568.000,00	22.473.520,00	73,52	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	42.600.000,00	41.551.959,00	97,54	
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>341.192.000,00</b>	<b>315.092.945,00</b>	<b>92,35%</b>	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	280.912.000,00	270.122.550,00	96,16	
	Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	60.280.000,00	44.970.395,00	74,60	
<b>6</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>785.000.000,00</b>	<b>709.229.949,00</b>	<b>90,35%</b>	
	Kajian Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	380.000.000,00	361.332.100,00	95,09	
	Kajian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	180.000.000,00	148.445.000,00	82,47	
	Pengembangan Penguatan SIDa Kota Balikpapan	225.000.000,00	199.452.849,00	88,65	
	<b>Jumlah</b>	<b>3.294.514.800,00</b>	<b>2.977.734.077,00</b>	<b>90,38</b>	
	<b>Total Belanja Langsung</b>	<b>5.639.499.560,00</b>	<b>5.158.436.321,50</b>	<b>91,47</b>	

Selain 6 (enam) program diatas, terdapat 2 (dua) program pendukung tercapainya Sasaran Strategis Bappeda Litbang Tahun 2018 dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.731.447.760,00</b>	<b>1.591.019.992,50</b>	<b>91,89</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.200.000,00	2.597.000,00	81,16	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.840.000,00	11.874.124,00	47,80	
	Penyediaan Jasa	20.000.000,00	12.451.000,00	62,26	

	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	200.000.000,00	196.977.104,00	98,49	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	150.000.000,00	145.473.570,00	96,98	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	130.000.000,00	97.975.000,00	75,37	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	7.788.250,00	77,88	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	200.000.000,00	166.280.200,00	83,14	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	870.280.000,00	835.162.104,50	95,96	
	Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran.	123.127.760,00	114.441.640,00	92,95	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>613.537.000,00</b>	<b>589.682.252,00</b>	<b>96,11%</b>	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	313.537.000,00	309.125.200,00	98,59	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100.000.000,00	99.270.160,00	99,27	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional.	100.000.000,00	95.592.544,00	95,59	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100.000.000,00	85.694.348,00	85,69	
	<b>Jumlah</b>	<b>2.344.984.760,00</b>	<b>2.180.702.244,50</b>	<b>92,99</b>	
	<b>Total Belanja Langsung</b>	<b>5.639.499.560,00</b>	<b>5.158.436.321,50</b>	<b>91,47</b>	

## **BAB. IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Secara umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan pada tahun 2018 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari 5 (lima) sasaran strategis yang ditargetkan melalui indikator kinerja sebanyak 6 (enam) pada tahun 2017 rata-rata mencapai **101,82%**.

Pencapaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dan juga peran masyarakat yang ikut serta dalam menyampaikan aspirasi dalam pembangunan kota Balikpapan. Sedangkan pada akuntabilitas keuangan realisasinya mencapai **91,74%** dari total Anggaran Belanja Langsung.

Sedangkan target yang belum tercapai secara maksimal salah satunya disebabkan karena belum adanya komitmen dari para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang selaras. Dengan adanya komitmen terhadap keselarasan serta konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka tidak akan ditemukan adanya program dan kegiatan yang muncul dalam usulan namun tidak tercakup dalam Renstra ataupun RPJMD.

Belum dalam diterapkannya sistem atau aplikasi yang memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan juga berpengaruh terhadap tingkat keselarasan dokumen perencanaan.

### **4.2 Saran**

Dalam meningkatkan kinerja maka terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain:

1. Untuk meningkatkan keterisian data SIPD ini diharapkan pemerintah daerah membuat suatu kebijakan tentang SIPD seperti membuat payung hukum teknis dan mekanisme pengelolaan penyediaan dana, melakukan MoU dengan lembaga atau instansi vertikal yang berada di kota Balikpapan, dimana instansi tersebut sangat erat hubungannya dengan perkembangan yang ada di Kota Balikpapan;
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam menyampaikan aspirasi atau usulan program dan kegiatan pembangunan;
3. Perlu adanya petunjuk serta pendampingan dalam menyusun Rencana Strategis serta Rencana Kerja OPD sehingga terdapat perencanaan yang terarah dan konsisten;
4. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi perangkat daerah Kota Balikpapan, baik legislatif dan eksekutif dalam penyusunan atau pembahasan dokumen perencanaan;
5. Serta sosialisasi, regulasi dan monitorisasi yang mengharuskan komitmen eksekutif dan legislatif untuk menjamin integrasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran;

6. Segera menerapkan sistem penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan berbasis aplikasi online;
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian, studi dan kajian yang belum ditindaklanjuti oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan ataupun OPD teknis lainnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clear Government yang melibatkan *Stake Holder* sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan ini dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kota Balikpapan. Semoga pada tahun mendatang kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan dapat semakin ditingkatkan searah dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan selaku perencana dan koordinator pembangunan di Kota Balikpapan.

Balikpapan, Februari 2019

KEPALA BAPPEDA LITBANG  
KOTA BALIKPAPAN

NINING SURTININGSIH